

Analisis Isi Tajuk Rencana tentang Korupsi di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

Roni Fajar Anggara
Email: rony.fa22@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia is a serious problem that is difficult to eradicate. Cases of corruption seem endlessly going on in this country. In 2013 recorded a year in which the highest number of cases of corruption in the last five years. The media have a role as a “watch dog” in the control of a government. In its role to control corruption, the media can be used as an editorial. Therefore, researchers interested in conducting research on the editorial about corruption as a manifestation toward social responsibility. The method was used is quantitative content analysis method. On the results showed that the daily newspapers in the Kedaulatan Rakyat includes editorial about corruption during 2013 tend to present the scope of corruption in the central government, followed its development by using the techniques discussed in combination with quotes explanation. A corruption case he describes in detail the points issues, goals and objectives in order to be easily understood by the reader; and to strengthen his argument also included excerpts from the relevant sources. Political and law dimension is the aspect that is often mentioned. The type and nature of the editorial that tend to be found is a combination of editorial and explanatory nature argued, because in giving a view on corruption is more likely to explain a story which became warm event and also presented arguments in response to an event with analysis. In this case, although the daily newspaper Kedaulatan Rakyat editorials raised corruption in the central government which showed that they played a role as a tool of government control (watch dog), but the daily newspaper Kedaulatan Rakyat as the local newspaper even did not raise the case of corruption in scope Yogyakarta.

Keywords : newspapers, editorial, corruption, watch dog, political news, press functions

Abstrak

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang sulit untuk diberantas. Tahun 2013 tercatat merupakan tahun dimana angka kasus korupsi terbanyak dalam lima tahun terakhir. Media mempunyai peran sebagai “watch dog” dalam mengontrol pekerjaan pemerintah. Dalam perannya mengontrol kasus korupsi, media bisa menggunakan tajuk rencana sebagai bentuk pers tanggung jawab sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* dalam memuat tajuk rencana tentang korupsi selama tahun 2013 cenderung menyajikan kasus korupsi di pemerintahan pusat. Dimensi politik dan hukum adalah aspek yang sering disinggung dalam pemuatan tajuk, lebih mempunyai fungsi menjelaskan berita. Jenis dan sifat tajuk rencana yang cenderung ditemui adalah kombinasi antara tajuk rencana yang bersifat menjelaskan dan yang bersifat memberikan argumentasi. walaupun surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* mengangkat tajuk-tajuk korupsi di pemerintahan pusat yang menunjukkan bahwa mereka turut berperan sebagai alat kontrol pemerintahan (*watch dog*), namun surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* sebagai surat kabar lokal malah tidak mengangkat kasus korupsi di lingkup edarnya yakni Yogyakarta.

Kata kunci : surat kabar, tajuk rencana, korupsi, *watch dog*, berita politik, fungsi pers

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan sebuah hal pelik yang sulit diberantas. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya dalam pemerintahan bangsa ini. Masalah korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Tidak hanya di tingkat eksekutif, korupsi pun juga terjadi di tingkat pemerintahan daerah.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi (Chaerudin-Syaiful-Syarif, 2008: 2).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Sub a, dijelaskan bahwa korupsi ialah: barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara.

Sepanjang tahun 2013 banyak diwarnai tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ataupun tokoh politik papan atas negeri ini. Diantaranya adalah kasus korupsi Muhammad Nazaruddin, kasus korupsi daging sapi oleh Ahmad Fathananh dan Lunthfi Hasan Isqaak, kasus korupsi Susno Duadji, kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM oleh Irjen Djoko Susilo, kasus korupsi Hambalang oleh Andi Mallarangeng, kasus korupsi Akil Mochtar, kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah, dan kasus korupsi lainnya.

Korupsi tentunya mengakibatkan kerugian negara yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan negara, baik secara materiil maupun secara moril. Pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke 114 dari 177 negara terkorup di dunia. Hal ini tentunya bukan suatu prestasi yang baik dalam pembangunan bangsa.

Menurut pemberitaan dari media online www.tempo.co, hasil pemeringkatan indeks korupsi, yang dilansir dari laman Gallup pada 15 Oktober 2014, menyebutkan Indonesia bertengger di puncak daftar negara terkorup di Asia Tenggara. Tahun 2013 boleh dikatakan sebagai tahun korupsi, pasalnya pada tahun

Peringkat Korupsi Indonesia Di Dunia Tahun 2013

RANK	COUNTRY	SCORE	SURVEYS USED	CI. LOWER	CI. UPPER	2012 SCORE
106	Bolivia	34	7	28	40	34
106	Gabon	34	5	32	36	35
106	Mexico	34	9	31	37	34
106	Niger	34	5	28	40	33
111	Ethiopia	33	8	29	37	33
111	Kosovo	33	3	29	37	34
111	Tanzania	33	8	29	37	35
114	Egypt	32	7	27	37	32
114	Indonesia	32	9	26	38	32
116	Albania	31	7	26	34	33
116	Nepal	31	5	29	33	27
116	Vietnam	31	8	27	35	31
119	Mauritania	30	5	23	37	31
119	Mozambique	30	7	27	33	31
119	Sierra Leone	30	8	26	34	31
119	East Timor	30	3	25	35	33
123	Belarus	29	5	22	36	31

Sumber : (<http://tipikorlitbang.com/peringkat-korupsi-indonesia-di-dunia-tahun-2013/>) diakses pada tanggal 13/10/2014, pukul 14:26.

tersebut terjadi kenaikan angka kasus korupsi yang signifikan.

Menurut pemaparan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang dimuat di media www.beritasatu.com, jumlah tersangka kasus korupsi pada tahun 2013 sebesar 560 kasus dan untuk total kerugian negara akibat korupsi selama tahun 2013 sebesar Rp 7,3 triliun. Menurut data dari KPK, tabulasi data penanganan korupsi pada tahun 2004 sampai tahun 2014 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2013 merupakan jumlah terbanyak yakni 81 kali

**Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014
(per 31 Agustus 2014)**

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	60	645
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	40	393
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	32	309
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	27	270
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	35	282

: (<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>) diakses pada tanggal 13/10/2014, pukul 14:44.

Indonesia mempunyai beberapa lembaga selain kepolisian dan kejaksaan yang bertugas untuk menangani kasus korupsi, diantaranya BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

Dalam prakteknya, untuk memberantas tindakan kasus korupsi sebaiknya dilakukan oleh semua kalangan baik itu pemerintah, lembaga peradilan, media, maupun masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kasus korupsi. Tidaklah mudah untuk memberantas korupsi di negeri ini, butuh kerja sama dari semua pihak tak terkecuali oleh media. Begitu besarnya pengaruh media dalam masyarakat yang demokratis sehingga media ditempatkan sebagai pilar keempat negara (*the fourth estate*). (Wiryawan, Hari. 2007: 68).

Peran strategis untuk ikut mensukseskan program pemberantasan korupsi adalah media. Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40

Tahun 1999 Pasal 6 dalam Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak dan Kewajiban dan Peranan Pers, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan

saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Media masa atau pers juga mempunyai fungsi sebagai kontrol dalam menyelidiki pekerjaan pemerintah atau istilahnya sebagai "*watch dog*" yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik dan dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan itu sendiri yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Media dalam menjalankan fungsi ataupun peran pers dalam mengontrol pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam tindakan korupsi dapat menggunakan tajuk rencana sebagai alatnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagian tajuk rencana tentang korupsi. Tajuk sendiri peneliti pilih karena merupakan pandangan atau sikap resmi dari media dalam menyikapi persoalan, sehingga dapat diketahui bagaimana sikap media dalam menanggapi kasus korupsi. Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi media

sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai induk artikel dalam surat kabar atau majalah, tajuk rencana juga disebut sebagai mahkota. Karakter atau identitas sebuah surat kabar terletak pada tajuk rencana. (Sumadiri, 2005:2-3).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat tiga Surat Kabar lokal yang populer bagi masyarakat, adalah *Kedaulatan Rakyat*, *Tribun Jogja*, dan *Harian Jogja*. Dari ketiga surat kabar tersebut, *Kedaulatan Rakyat* lah yang mempunyai kepedulian dengan kasus korupsi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merilis tajuk rencana tentang korupsi sebanyak 37 kali selama tahun 2013. Sedangkan surat kabar *Tribun Jogja* hanya 17 kali dan surat kabar harian *Jogja* sebanyak 5 kali selama tahun 2013. Tajuk rencana pada SKH *Kedaulatan Rakyat* terdapat dalam rubrik "opini".

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti bermaksud melihat bagaimana kecenderungan tajuk rencana tentang korupsi yang dimuat di harian *Kedaulatan Rakyat* selama tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter dari surat kabar "*Kedaulatan Rakyat*" dalam pandangannya mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di skala lokal maupun nasional..

Dalam paparan ini, peneliti mengacu pada "teori tanggung jawab sosial". Teori ini muncul pada abad ke-20 di Amerika, dimana orang mulai secara bertahap menjauhi teori libertarianisme yang telah menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini berasal dari tulisan W.E Hocking, yang merupakan hasil rumusan Komisi Kebebasan Pers yang diikuti oleh para praktisi jurnalistik tentang kode etik media, yang kemudian dikenal sebagai *Komisi Hutchins*.

Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut para penulis pada waktu itu, kebebasan yang telah dinikmati oleh pers Amerika Serikat harus dibatasi oleh moral dan etika. Media massa harus melakukan

tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. (Ardianto, Komala dan Karlinah, 2009: 161-162).

Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi utama yaitu, bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting dalam komunikasi masa dalam masyarakat modern asal saja pers tahu tanggung jawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka. Jika pers tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa. (Siebert, Peterson dan Schramm, 1986: 83-84).

Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggung jawab sosial sama dengan fungsi pers dalam teori libertarian. Terdapat enam tugas pers menurut teori tradisional (libertarian), antara lain :

1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.
4. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan.
5. Menyediakan hiburan.
6. Mengusahakan sendiri biaya finansial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang-orang yang punya kepentingan tertentu. (Siebert, Peterson dan Schramm, 1986: 83-84).

Teori tanggung jawab sosial secara

umum menerima enam fungsi diatas, tetapi menyatakan tidak puas terhadap interpretasi para pemilik dan pelaksana media tentang fungsi itu. Teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak-hak orang-perorangan.

Teori ini menerima peran pers dalam melayani sistem ekonomi, tetapi tidak menghendaki diprioritaskannya fungsi ini melebihi fungsi mendukung proses demokrasi atau memberikan penerangan kepada masyarakat.

Seperti halnya teori libertarian yang disusun oleh berbagai pemikiran, maka pemunculan teori tanggung jawab sosial juga adalah karena pemikiran banyak orang. Teori tanggung jawab sosial sebagian besarnya tetap merupakan cangkakan ide-ide baru ke teori libertarian. Namun Komisi Kebebasan Pers dalam berbagai bukunya setelah Perang Dunia II banyak mendorong terbentuknya teori tanggung jawab sosial sebagai sebuah teori baru dan terpadu, bukan hanya sekedar embel-embel teori libertarian. Buku "*A Free and Responsible Pers*" karangan Komisi ini dan "*Freedom of The Press : A Framework of Principle*" karangan William E. Hocking, anggota Komisi Kebebasan Pers, merupakan dua buku paling penting dari ide teori tanggung jawab sosial. Diantara anggota komisi pun belum ada kesamaan pendapat, karena ada yang menjadi pemeluk tradisi libertarian dan ada yang berdiri jauh dari tradisi itu. Namun semua anggota setuju terhadap laporan bersama dan sebuah ringkasan "*Summary of Principle*". Teori tanggung jawab sosial sebagian besarnya tetap sebuah teori. Tetapi sebagai teori ia sangat penting karena menganjurkan sebuah arah pemikiran tentang kebebasan pers. Tentu saja, kemudian beberapa aspek dari teori ini ada juga yang dipraktikkan.

Teori tanggung jawab sosial lahir karena beberapa hal. Salah satunya adalah revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika, dan yang mempengaruhi sifat dasar pers. Hal lainnya

adalah suara-suara kritik yang tajam, yang semakin sering diucapkan pada saat media telah tumbuh semakin besar dan penting, dan yang mengandung ancaman pengaturan oleh pemerintah. Hal lainnya lagi, adanya iklim intelektual yang baru, dimana orang-orang mulai curiga terhadap kebenaran asumsi-asumsi dasar Jaman Terang.

Komisi Kebebasan Pers telah menggariskan lima hal yang dituntut masyarakat modern kepada persnya, dan kesemuanya merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers. Patokan-patokan ini bukanlah asli buatan Komisi. Patokan-patokan itu terutama diambil dari profesi dan praktek-praktek para pelaksana media sendiri. Lima hal yang menjadi patokan tersebut antara lain :

1. Pers dituntut untuk menyajikan laporan-laporan tentang kejadian-kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas dalam suatu konteks yang memberi arti kepada kejadian-kejadian itu. Ini menuntut pers untuk selalu akurat, tidak boleh berbohong. Ini juga berarti, kata Komisi, pers harus menyatakan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat.
2. Pers harus menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik. Ini berarti lembaga komunikasi massa yang besar itu harus menganggap diri mereka sebagai kurir umum bagi diskusi di kalangan masyarakat, walaupun itu tidak berarti bahwa ada hukum yang memaksa media itu menerima semua orang yang ingin memakai ruangnya atau pemerintah hendaknya mengatur tarifnya, atau bahkan bahwa seseorang dapat menuntut, sebagai haknya, media itu menyebarkan ide-idenya.
3. Pershendaknyamenonjolkansebuahgambaran representatif dari kelompok-kelompok unsur pokok dalam masyarakat. Berkaitan erat dengan dua syarat sebelumnya, syarat ini meminta pers secara akurat mengungkapkan kelompok-kelompok sosial, misalnya kelompok China atau Negro, karena orang-orang cenderung membuat keputusan sesuai

dengan citra yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan suatu penggambaran yang salah akan dapat menyimpangkan penilaian yang akurat.

4. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Pers hendaknya menyajikan kesempatan penuh untuk memperoleh berita sehari-hari. (Siebert, Peterson dan Schramm, 1986: 99-104).

Pada saat jurnalis mendapatkan etika untuk bertanggung jawab, mereka berpendapat bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi, punya hak asasi untuk diberi informasi dan bahwa pers merupakan agen masyarakat untuk memecahkan penghalang-penghalang kebebasan alur berita. Pemikiran seperti itu menandai adanya penyimpangan dari teori libertarian tradisional, yang menjamin perolehan berita sehari-hari hanya dengan menjaga kebebasan berekspresi.

Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal dan suatu kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai induk artikel dalam surat kabar atau majalah, tajuk rencana juga disebut sebagai mahkota. Karakter atau identitas sebuah surat kabar terletak pada tajuk rencana. (Sumadiria, 2005:2-3).

Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi pers yang bersangkutan secara keseluruhan sebagai suatu lembaga penerbitan media berkala. Opini yang ditulis di dalam tajuk rencana merupakan suara yang disusun beberapa orang yang terlibat dalam tim redaksi, atau dengan kata lain merupakan suara kolektif dari seluruh wartawan dan jajaran redaksi dalam suatu media pers. Sehingga tidak dicantumkan nama penulisnya.

Menurut Assegaff dalam (Sumadiria, 2005:83), tajuk rencana sedikitnya harus mengandung lima unsur yang satu sama lainnya terkait: 1. Menyatakan suatu pendapat,

2. Pendapat itu disusun secara logis, 3. Singkat, 4. Menarik, serta dimaksudkan untuk, 5. Mempengaruhi pendapat para pembuat kebijakan dalam pemerintah atau masyarakat. Rivers dalam (Sumadiria, 2005:83) menjelaskan fungsinya tajuk rencana yang mencakup empat hal, diantaranya:

1. Menjelaskan berita (*explaining the news*)
Tajuk rencana menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada para pembaca. Tajuk rencana berfungsi sebagai guru, menerangkan bagaimana suatu kejadian tertentu berlangsung, faktor-faktor apa yang diperhitungkan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, dengan cara bagaimana kebijakan baru akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.
2. Menjelaskan latar belakang (*filling in background*)
Untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting, tajuk rencana dapat menggambarkan kejadian tersebut dengan latar belakang sejarah, yaitu menghubungkannya dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dengan menganalisis sejarah sekarang, tajuk rencana dapat memperlihatkan keterkaitannya dengan masalah-masalah umum sekarang. Tajuk rencana dapat menunjukkan hubungan antara berbagai peristiwa yang terpisah: politik, ekonomi, atau sosial.
3. Meramalkan masa depan (*forecasting the future*)
Suatu tajuk rencana kadang-kadang menyajikan analisis yang melewati batas berbagai peristiwa sekarang dengan tujuan meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa datang.
4. Menyampaikan pertimbangan moral (*passing moral judgment*)
Menurut tradisi lama, para penulis tajuk rencana bertugas mempertahankan kata hati masyarakat. Mereka diharapkan mempertahankan isu-isu moral dan mempertahankan posisi mereka.

Tajuk rencana juga dapat dikenali lebih jauh

berdasarkan jenis dan sifat yang dimilikinya (Assegaff dalam Sumadiria, 2005:85-86), antara lain sebagai berikut:

1. Tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata.
Tajuk semacam ini agak jarang dijumpai. Kalaupun ada, pada umumnya karena si penulis tajuk masih belum mengetahui kenijakan apa yang diambil oleh surat kabarnya.

2. Tajuk rencana yang bersifat menjelaskan.
Jenis tajuk ini hampir sama dengan interpretasi yang memberikan penjelasan kepada suatu peristiwa atau berita.

3. Tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi.

Tajuk rencana ini bersifat analitis dan memberikan argumentasi mengapa sampai terjadi sesuatu hal dan apa akibatnya

4. Tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi.

Tajuk semacam ini adalah tajuk yang mendorong timbulnya aksi dari masyarakat.

5. Tajuk rencana yang bersifat jihad.

Tajuk semacam ini umumnya datang berturut-turut dan dengan sikap yang jelas terhadap sesuatu asal. Tujuannya juga jelas untuk mengadakan perubahan. Contohnya tajuk-tajuk rencana yang terus menerus tentang anti judi dan kemudian menghapuskan judi.

6. Tajuk rencana yang bersifat membujuk.

Jenis tajuk rencana yang bersifat membujuk ditujukan secara halus kepada masyarakat pembaca untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum.

7. Tajuk rencana yang bersifat memuji.

Jika ada tajuk yang mendorong timbulnya aksi maka sudah wajar juga jika ada tajuk yang ditujukan untuk memuji atau memberikan pujian atas suatu prestasi yang terjadi pada masyarakat.

8. Tajuk rencana yang bersifat menghibur.

Tajuk jenis ini sering terdapat dalam suatu surat kabar yang isinya semata-mata hiburan dan sering dikaitkan dengan *human interest story*. Misalnya tajuk duka karena meninggalnya gajah tertua di kebun binatang

Ragunan, Jakarta.

Tajuk rencana sering juga disebut sebagai mahkota media pers. Kehormatan dan kewibawaan suatu media pers, antara lain ditentukan oleh profesionalisme para pengelolanya dalam menangani, memperlakukan, dan menempatkan tajuk rencana.

Apabila tajuk rencana hanya diberlakukan sebagai pelengkap dalam pemenuhan unsur universalitas atau kesemestaan media pers, maka posisi dan fungsi tajuk rencana tidak dianggap penting. Karena tidak dianggap penting, maka tajuk rencana tidak bisa ditulis oleh siapa saja tanpa kriteria dan kualifikasi apapun kecuali penulis tajuk rencana itu adalah wartawan media pers bersangkutan.

Sebagai mahkota suatu penerbitan pers, tajuk rencana dengan sendirinya sangat selektif dalam memilih topik atau pokok ulasan. Sebagaimana halnya tidak semua peristiwa layak diangkat sebagai berita, maka begitu juga tidak setiap berita layak untuk dipilih dan ditetapkan sebagai topik atau pokok ulasan tajuk rencana. Kriteria topik tajuk rencana yang baik mencakup enam hal :

1. Topik merujuk kepada berita atau peristiwa yang aktual atau kontroversial, atau keduanya, sehingga memiliki daya tarik dan penting untuk segera diketahui oleh khalayak pembaca.
2. Topik sesuai dengan filosofi, visi, misi dan kebijakan umum media penerbitan pers.
3. Topik sejalan dengan kualifikasi dan fokus wilayah sirkulasi media penerbitan.
4. Topik berpijak kepada kaidah dan nilai standar jurnalistik seperti aktualitas, objektivitas, keluarbiasaan suatu peristiwa atau berita dilihat dari sisi cakupan volume dan dampaknya, akurasi, dan prinsip liputan berimbang (*cover both sides*).
5. Topik tidak bertentangan dengan aspek ideologis, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek etis yang terdapat dalam masyarakat atau bangsa.
6. Topik senantiasa berorientasi kepada nilai-

nilai luhur peradaban universal seperti kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetaraan, persaudaraan, demokrasi, transparansi, penegakan supremasi hukum. (Sumadiria, 2005:93-94).

Sebuah tajuk rencana yang baik memuat hal-hal berikut ini : pernyataan masalah pokok atau topik, alasan mengapa hal itu penting, penyajian fakta-fakta yang bersangkutan dengan topik, pernyataan sikap yang diambil terhadap topik tersebut, evaluasi terhadap mereka yang mengambil sikap lain, pernyataan alternatif lain, pembuatan perbandingan atau analogi dengan isu-isu atau topik-topik lain dan akhirnya kesimpulan. (Kusumaningrat, Hikmat. Kusumaningrat, Purnama. 2009:249). Oleh karena itu, jika tajuk rencana suatu media mengangkat topik korupsi, dapat diartikan media memberi perhatian tertentu pada permasalahan ini.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*", "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptie*" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan (Sudarto dalam Chaerudin, Dinar, Fadillah, 2009:2).

Vino Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. (Vino Tanzi dalam Chaerudin, Dinar, Fadillah, 2009:2). Selanjutnya ia mengembangkan tujuh tipologi korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi Ekstraktif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal

dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.

4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi Supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. (Alatas dalam Chaerudin, Dinar, Fadillah, 2009:2-3).

Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijakan, keuntungan tarif dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana.

Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah "analisis isi kuantitatif". Menurut Klaus Krippendorff, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. (Krippendorff, Klaus, 1993: 15)

Analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih.

Prinsip analisis isi berdasarkan definisi diatas :

1. Prinsip Sistemik

Ada perlakuan prosedur yang sama pada

semua isi yang dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.

2. Prinsip Objektif

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset, bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama walaupun risetnya beda.

3. Prinsip Kuantitatif

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.

4. Prinsip isi yang nyata

Hal yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi

yang tampak. (Budd, 1967 dalam Rachmat Kriyantono, 2006: 228-229).

Secara intuitif, analisis isi dapat dikarakteristikan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan. Dalam analisis isi haruslah jelas data mana yang dianalisis, bagaimana data tersebut ditentukan dan dari populasi mana data tersebut diambil. Objek dari penelitian ini adalah SKH "Kedaulatan Rakyat" yang memuat tajuk rencana yang bertemakan tentang korupsi sepanjang tahun 2013.

Unit muncul dalam interaksi antara realitas dan pengamat (observernya). Unit adalah fungsi dari fakta empiris, tujuan penelitian dan tuntutan yang dibuat oleh berbagai teknik yang ada. (Krippendorff, 1993; 75). Dalam unit-unit analisis tersebut terdapat poin-poin kategori pembagian atau pembatasan yang akan dijadikan sebagai indikator.

Hasil dan Pembahasan

Cakupan Tajuk

Unit analisis ini untuk menggolongkan

Unit Analisis Tajuk Rencana Tentang Korupsi di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Tahun 2013

Unit analisis	Unit kategori
1. Skala Tajuk Rencana	a. Korupsi skala nasional b. Korupsi skala daerah
2. Topik Tajuk Rencana	a. Dampak korupsi b. Hukuman korupsi c. Penyelidikan kasus korupsi d. Proses terjadinya korupsi e. Pencegahan terjadinya korupsi f. Kombinasi
3. Teknik Pembahasan Tajuk Rencana	a. Penjelasan b. Kutipan c. Contoh d. Statistik e. Kombinasi

4. Dimensi	a. Politik b. Hukum c. Ekonomi d. Sosial dan budaya e. Kombinasi
5. Fungsi Tajuk Rencana	a. Menjelaskan berita b. Menjelaskan latar belakang c. Meramal masa depan d. M e n y a m p a i k a n pertimbangan moral e. Kombinasi
6. Jenis dan Sifat Tajuk Rencana	a. Tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata. b. Tajuk rencana yang bersifat menjelaskan. c. Tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi. d. Tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi. e. Tajuk rencana yang bersifat jihad. f. Tajuk rencana yang bersifat membujuk. g. Tajuk rencana yang bersifat memuji. h. Tajuk rencana yang bersifat menghibur. i. Kombinasi.

tajuk-tajuk rencana tentang korupsi berdasarkan skala cakupan pembahasannya. Unit analisis ini dikategorikan menjadi :

1. Korupsi Skala Nasional, yaitu topik tajuk rencana tentang korupsi yang terjadi di tingkat nasional.
2. Korupsi Skala Daerah, yaitu topik tajuk rencana tentang korupsi yang terjadi di tingkat

daerah.

Tajuk rencana mengenai korupsi selama tahun 2013 di harian Kedaulatan Rakyat lebih sering memuat tajuk rencana lingkup nasional. Ini mengindikasikan bahwa masalah-masalah korupsi di tingkat nasional merupakan masalah besar bangsa yang layak untuk diangkat. Di sisi lain, SKH *Kedaulatan Rakyat*

Analisis tajuk rencana berdasarkan skala tajuk Pada SKH Kedaulatan Rakyat 2013

Unit Analisis	Nasional	%	Daerah	%	Jumlah
Tahun 2003	35	94,6	2	5,4	37

(sumber : data primer)

kurang mengulas dalam tajuknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan edarnya, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri sebenarnya terdengar kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul yang melibatkan pemilik dari *Kedaulatan Rakyat* sendiri, yakni Idham Samawi, namun *Kedaulatan Rakyat* tidak pernah sekalipun memberitakan ataupun membahas tajuk tentang kasus yang dialami Idham tersebut.

Pada bulan November tercatat memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Pada bulan November tersebut banyak dimuat kasus Bank Century, karena merupakan kelanjutan dari kasus yang terjadi sejak era kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang memasuki babak baru, yakni penyelidikan oleh terdakwa mantan Wapres atau mantan Gubernur BI Boediono.

Berikut contoh tajuk rencana SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan skala nasional :

Kesaksian Boediono dan Jusuf Kalla

Selama 10 jam KPK memeriksa Wapres Boediono di Istana Wapres, Sabtu (23/11). Beliau diperiksa dalam kepastiannya sebagai saksi kasus Bank Century (BC) bagi tersangka Budi Mulya. Boediono dan Budi Mulya, saat Bank Indonesia (BI) memutuskan mengucurkan dana bailout yang nilainya mencapai Rp 6,7 triliun, masing-masing menjabat Gubernur BI dan Deputy Gubernur BI. Kita memperoleh kesan penjelasan sekaligus pendirian Jusuf Kalla dan Boediono itu saling bertolak belakang. Inilah barangkali sisi substantif penjelasan dan penegasan keduanya, sehingga ketika mantan Wapres dan Wapres itu bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk tersangka Budi Mulya nantinya, akan memunculkan silang pendapat yang menarik perhatian banyak kalangan. (25/11/2013)

Dalam memuat tajuk rencana skala daerah, SKH *Kedaulatan Rakyat* justru tidak memuat kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta. Tajuk rencana tentang korupsi skala daerah yang dimuat oleh SKH *Kedaulatan Rakyat* justru kasus korupsi di daerah lain, yakni di Lombok

Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berikut contoh tajuk rencana SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan skala daerah :

Suap Jaksa, Mengapa Tak Kapok ? Jagat hukum kembali terguncang menyusul penangkapan Keoala Kejaksaan Negeri Praya, Mataram, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), M Subari, terkait dugaan kasus suap. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Subari bersama seorang perempuan pengusaha, Lusita, di kamar hotel pantai Senggigi, Lombok, NTB, Sabtu (14/2) malam. Merka telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tanah. Dalam aksi tangkap tangan itu, KPK juga menita uang pecahan dolar AS serta pecahan rupiah yang bila ditotal mencapai Rp 213 juta.

Topik Tajuk Rencana

Unit analisis ini dikategorikan menjadi tujuh kategori. Dampak korupsi, hukuman korupsi, penyelidikan kasus korupsi, proses terjadinya korupsi, pencegahan korupsi, dan kombinasi dari topik tersebut pada umumnya menjadi tema yang diulas dalam tajuk SKH *Kedaulatan Rakyat*.

1. Dampak korupsi, yaitu topik tajuk rencana yang membahas dampak dari terjadinya kasus korupsi.
2. Hukuman korupsi, yaitu topik tajuk rencana yang membahas hukuman yang diterima bagi pelanggar kasus korupsi.
3. Penyelidikan kasus korupsi, yaitu topik tajuk rencana yang membahas tentang penyelidikan kasus korupsi yang belum menghasilkan putusan hukuman.
4. Proses terjadinya korupsi, yaitu topik tajuk rencana yang membahas tentang kronologi atau penyebab terjadinya kasus korupsi.
5. Pencegahan terjadinya korupsi, yaitu topik tajuk rencana yang membahas bagaimana pencegahan untuk menanggulangi terjadinya kasus korupsi.
6. Kombinasi, yaitu unit kategori yang digunakan untuk mengetahui isi topik tajuk rencana yang

menggunakan percampuran dari berbagai topik diatas.

Adapun komposisi secara kuantitatif deskriptif atas tajuk rencana SKH Kedaulatan Rakyat selama tahun 2013, berdasarkan topik yang diulas adalah sebagai berikut:

SKH *Kedaulatan Rakyat* lebih banyak menjelaskan tentang proses hukum yang sedang berjalan. Tujuan dari SKH *Kedaulatan Rakyat* ini

Analisis tajuk berdasarkan topik SKH Kedaulatan Rakyat tahun 2013

Unit Analisis	F	%
Dampak	-	-
Hukuman	4	10,81
Penyelidikan	22	59,45
Proses	4	10,81
Pencegahan	4	10,81
Kombinasi	3	8,11
Jumlah	37	100

Sumber: Data Primer

adalah supaya masyarakat dapat semakin jelas dalam mengikuti perkembangan kasus korupsi yang tengah terjadi. Korupsi merupakan masalah yang penting karena korupsi juga merugikan warga negara Indonesia, sehingga masyarakat pun wajib untuk mengetahui berbagai perkembangan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini.

Pemberitaan dari media pun juga harus mengikuti jalannya penyelidikan sehingga dapat diketahui bagaimanakah suatu kasus korupsi tersebut terjadi. Disini SKH *Kedaulatan Rakyat* memuat tajuk rencananya secara bertahap sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan untuk memperjelas suatu kasus korupsi yang tengah terjadi. Masyarakat tentunya akan semakin paham dengan maksud dari berita-berita tentang korupsi yang dimuat sebelumnya.

Berikut contoh tajuk rencana SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan topik penyelidikan kasus korupsi :

'Bola Liar' Skandak Century

Akankah Wapres Boediono terjerat kasus Century? Inilah pertanyaan yang muncul di

masyarakat. Sebenarnya, sudah laa nama Boediono dikait-kaitkan dengan skandal bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Bahkan, presiden SBY pun pernah ikut terseret-seret dalam kasus tersebut.

Di dalam tajuk rencana topik kombinasi terdapat tiga tajuk yang berbeda, diantaranya adalah topik tentang dampak korupsi dengan penyebab terjadinya korupsi, penyelidikan kasus korupsi dengan hukuman korupsi, serta proses terjadinya korupsi dengan pencegahan terjadinya korupsi.

Penulisannya tidak hanya terfokus pada sebuah topik, namun sekaligus pada beberapa topik. SKH *Kedaulatan Rakyat* berusaha merangkum sebuah kasus dengan menghubungkannya dengan topik-topik yang terkait dalam menarik suatu kesimpulan sebuah topik tajuk rencana. Berikut contoh tajuk rencana SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan topik kombinasi (dampak korupsi dengan penyebab terjadinya korupsi) :

Badai Korupsi Hantam DPR

Badai korupsi sepertinya tak henti-henti hantam Indonesia. Dampaknya sangat serius, perekonomian negara tak kunjung membaik, sebaliknya malah makin terperosok hingga ke titik paling rendah. Benar kiranya pernyataan salah seorang founding father negara ini, Moh Hatta, korupsi akan menggerogoti sendi-sendi negara. Bila tak segera ditanggulangi, negara yang diibaratkan sebagai kapal itu perlahan tapi pasti, akan tenggelam.

Tajuk Rencana Berdasarkan Teknik Pembahasan

Pada penulisan tajuk rencana terdapat beberapa jenis teknik dalam membahas suatu tajuk, antara lain :

1. Penjelasan

Penjelasan berarti menguraikan pokok persoalan, membagi dan memilah-milahnya berdasarkan urutan jenisnya, ukurannya, sifatnya, fungsinya, cakupannya, dampaknya. (Sumadiria, 2005:99). Teknik penjelasan ini

bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu kasus persoalan.

2. Kutipan

Kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair, lagu atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, buku. Tajuk rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. (Sumadiria, 2005:99).

3. Contoh

Contoh berarti memperjelas dan menegaskan uraian dengan suatu gambaran yang nyata, kongkret, yang bisa dibuktikan dengan pancaindra. (Sumadiria, 2005:99). Teknik pembahasantajukdenganmenggunakancontoh ini adalah untuk membantu memudahkan penjelasan sehingga penyampaian maksud penulisan dapat dipahami oleh pembaca.

4. Statistik

Statistik dalam tajuk rencana diartikan sebagai penyederhanaan masalah, serta pemberian makna terhadap deretan angka yang “tak bunyi”. Statistik jurnalistik menghendaki angka yang membisu menjadi mampu berbicara sendiri kepada pembaca. (Sumadiria, 2005:100). Teknik pembahasan tajuk rencana menggunakan statistik ini bertujuan untuk menjelaskan data supaya pembaca dapat memahami suatu pengetahuan dari disampaikannya data tersebut.

5. Kombinasi

Kombinasi yakni unit kategori yang digunakan untuk mengetahui teknik pembahasan tajuk rencana yang menggunakan percampuran dari berbagai teknik diatas.

Dapat dilihat bahwa SKH *Kedaulatan Rakyat* dalam menuliskan tajuk rencana tentang korupsi selama tahun 2013 lebih banyak menggunakan teknik pembahasan kombinasi, sedangkan pembahasan tajuk rencana dengan teknik penjelasan hanya sekali.

Kasus-kasus korupsi yang sering dimuat oleh SKH *Kedaulatan Rakyat* ini dijelaskan

Analisis tajuk rencana Berdasarkan pembahasan tahun 2013

Unit Analisis	F	%
Penjelasan	1	2,7
Kutipan	-	-
Contoh	-	-
Statistik	-	-
Kombinasi	36	97,3
Jumlah	37	100

Sumber: Data Primer

secara rinci pokok-pokok permasalahan, maksud dan tujuan supaya dapat membantu pembaca dalam memahami kasus-kasus korupsi yang dimuat di dalam tajuk. Berikut contoh tajuk rencana SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan teknik pembahasan kombinasi (penjelasan dan kutipan) :

*Mendikbud Perlu Berlaku Tegas
Indikasi terjadinya korupsi di Ditjen
Kebudayaan Kemdikbud mengagetkan.
Nilainya cukup fantastis, Rp 700 miliar.
Temuan itu oleh Irjen Kemdikbud Haryono
Umar telah dilaporkan kepada Mendikbud
Mohammad Nuh. Bahkan disarankan agar
Mendikbud melaporkan ke KP
Tentu Haryono Umar sangat mempercayai
temuan Itjen yang dipimpinnya. Meski
membungkusnya dengan istilah ‘indikasi’
– apalagi kemudian menyarankan agar
Mendikbud melapor ke KPK – kita pun
percaya Haryono Umar sangat bertanggung
jawab. Dapat dipastikan keberaniannya
menyampaikan saran seperti itu karena
Haryono Umar meyakini Itjen telah
menggenggam bukti awal yang kuat dan
akurat terjadinya tindak pidana.*

Analisis Isi Tajuk Rencana Berdasarkan Dimensi

Unit analisis ini menggolongkan tajuk rencana menjadi beberapa aspek dimensi, diantaranya :

1. Politik

Tajuk rencana berdimensi politik apabila

membahas masalah yang menyangkut kekuasaan dalam sistem kepemimpinan negara beserta perangkat-perangkat negara yang mencakup legislatif, birokrasi, partai politik, dan lain-lain.

2. Hukum

Tajuk rencana berdimensi hukum apabila membahas peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, serta mengandung unsur legal formal.

3. Ekonomi

Tajuk rencana berdimensi ekonomi apabila membahas peristiwa yang berkaitan dengan masalah perekonomian, perdagangan, industri, perbankan, serta keuangan

4. Sosial dan Budaya

Tajuk rencana berdimensi sosial budaya apabila tajuk rencana membahas masalah yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat serta kebudayaan yang ada ditengah masyarakat.

5. Kombinasi

Merupakan gabungan dari berbagai aspek dimensi yang tergabung dalam satu mauatan tajuk rencana.

Aspek dimensi tentang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya memang tidak digunakan secara khusus, namun aspek dimensi

Analisis tajuk rencana berdasarkan dimensi SKH Kedaulatan Rakyat tahun 2003

Unit Analisis	F	%
Politik	-	-
Hukum	-	-
Ekonomi	-	-
Sosial Budaya	-	-
Kombinasi	37	100
Jumlah	37	100

Sumber: Data Primer

tersebut tetap digunakan dalam kombinasi. Hal ini sendiri dikarenakan korupsi merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang dilakukan oleh suatu kekuasaan atau elite politik dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam mencari keuntungan pribadi ataupun bagi golongan.

Berikut contoh tajuk rencana SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan dimensi kombinasi (hukum dan politik) :

Elite Politik Membantah Tanpa Bukti Akankan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terjerembab dalam kubangan korupsi? Pertanyaan ini masih terus bergulir menyusul pengakuan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group (perusahaan milik M Nazaruddin), Yulianis sangat yakin Ibas menerima 200 ribu dolar AS saat Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Pengakuan itu disampaikannya usai menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi di pengadilan Tipikor Kamis lalu. Lantas mana yang benar? Tentu masih harus diuji di pengadilan. Meski demikian hemat kita, kesaksian Yulianis tak boleh di abaikan. Cobalah kita lihat serentetan kasus korupsi yang elibatkan elite politik, sebagian besar bermula dari kesaksian Yulianis. Ini sangat logis, karena Yulianis memegang otoritas keuangan di perusahaan milik Nazaruddin. Bahkan kasus korupsi yang membelit mantan bosnya ini, dalam kasus wisma atlet misalnya, juga berasal dari keterangan Yulianis. Semua pengeluaran keuangan tercatat rapi, termasuk kemana saja uang mengalir. Semua data dari Yulianis yang tersimpan di komputer maupun laptop, telah disita KPK.

Analisis Isi Tajuk Rencana berdasarkan Fungsi

Tajuk rencana sebagai pendapat atau opini resmi dari suatu media mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

a. Menjelaskan berita

Tajuk rencana berfungsi menjelaskan apabila persoalan yang dianggap penting dijelaskan secara rinci. Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan untuk menghasilkan perubahan.

b. Menjelaskan latar belakang

Menjelaskan latar belakang apabila

memperlihatkan kelanjutan suatu kasus penting serta dapat menggambarkan kejadian tersebut dengan latar belakang sejarah.

c. Meramalkan masa depan

Tajuk rencana berfungsi untuk menjelaskan masa depan apabila menjelaskan sesuatu peristiwa beserta kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang.

d. Menyampaikan pertimbangan moral

Tajuk rencana berfungsi menyampaikan pertimbangan moral apabila berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran di dalam masyarakat. Memperjuangkan nilai moral untuk tetap berada di masyarakat sehingga kehilangan orientasi tidak terjadi di kalangan pembaca.

e. Kombinasi

Kombinasi adalah gabungan dua atau lebih, dari empat kategori fungsi tajuk rencana diatas.

SKH *Kedaulatan Rakyat* menjelaskan berita korupsi berusaha memaparkannya dengan rinci, seperti apa kasus korupsi tersebut dan

Analisis tajuk rencana Berdasarkan fungsi di SKH Kedaulatan Rakyat 2013

Unit Analisis	F	%
Menjelaskan berita	18	48,65
HukuMenjelaskan latarbelakang	10	27,03
Meramalkan masa depan	0	-
Menyampaikan pertimbangan moral	1	2,7
Kombinasi	8	21,62
Jumlah	37	100

bagaimana kasus tersebut terjadi. Berita tentang kasus korupsi yang sebelumnya dimuat, diulas lagi dalam tajuk rencana. Di dalam memuat tajuk rencana, berita-berita yang sebelumnya dimuat, diperjelas lagi dengan sebuah uraian tentang kronologis kejadian, dampak maupun hubungan-hubungan dari setiap kejadian untuk ditelaah maksud tujuannya.

Fungsi tajuk rencana dalam

menyampaikan pertimbangan moral secara khusus cenderung jarang digunakan atau yang paling sedikit muncul. SKH *Kedaulatan Rakyat* sendiri dalam menyampaikan pendapat umumnya lebih menggabungkannya dengan fungsi yang lain karena dianggap lebih lengkap, namun secara khusus SKH *Kedaulatan Rakyat* juga menggunakan fungsi dalam menyampaikan pertimbangan moral ini dalam memberi pendapatnya pada situasi tertentu.

Analisis Isi Tajuk Rencana Jenis dan Sifat Tajuk Rencana

Tajuk rencana dapat dikenali lebih jauh berdasarkan jenis dan sifat yang dimilikinya. Jenis dan sifat tajuk rencana ini mencakup beberapa kemungkinan, yakni bersifat informasi, eksplanatif, argumentatif hingga kombinasi dari beberapa jenis dan sifat tersebut. Unit analisis ini menggolongkan tajuk rencana berdasarkan jenis dan sifat tersebut, antara lain:

a. Tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata.

Adalah jenis tajuk yang hanya memberikan informasi kepada pembacanya, karena penulis tajuk belum mengetahui kebijakan yang diambil oleh surat kabarnya. (Sumadiria, 2005:85).

b. Tajuk rencana yang bersifat menjelaskan.

Adalah jenis tajuk yang hanya memberikan penjelasan kepada suatu peristiwa. Tajuk ini hampir sama dengan interpretasi. Interpretasi pada umumnya dilakukan dengan member analisis dan prediksi ke mana arah kasus tertentu yang terjadi (Sumadiria, 2005:85)

c. Tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi semata.

Adalah tajuk rencana yang bersifat analisis dan memberikan argumentasi mengapa sampai terjadi sesuatu hal dan apa akibatnya. (Sumadiria, 2005:85).

d. Tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi.

Adalah jenis tajuk yang ditulis mendorong timbulnya aksi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi menjadi sangat penting (Sumadiria,

2005:85).

- e. Tajuk rencana yang bersifat jihad. Adalah tajuk yang datang berturut-turut dan dengansikap yang jelas terhadap suatu masalah. Tujuannya juga jelas untuk mengadakan perubahan. (Sumadiria, 2005:85)
- f. Tajuk rencana yang bersifat membujuk. Adalah jenis tajuk rencana yang bersifat membujuk ditujukan secara halus kepada masyarakat pembaca untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum. (Sumadiria, 2005:85).
- g. Tajuk rencana yang bersifat memuji. Adalah jenis tajuk yang ditujukan untuk memuji atau memberikan pujian atas suatu prestasi yang terjadi pada masyarakat. Apresiasi menjadi kata kunci dalam hal bagaimana suatu perilaku tertentu perlu dipuji dan dihargai (Sumadiria, 2005:86).
- h. Tajuk rencana yang bersifat menghibur. Adalah tajuk rencana yang isinya hanya semata-mata hiburan dan sering dikaitkan dengan *human interest story*. (Sumadiria, 2005:86).
- i. Kombinasi adalah gabungan dua atau lebih dari kedelapan kategori jenis dan sifat tajuk rencana tersebut. Kombinasi dapat terjadi dari berbagai jenis dan sifatnya. Untuk dikatakan suatu tajuk disebut kombinasi bila berisi dua atau lebih jenis dan sifatnya.

Jenis dan sifat tajuk rencana tentang korupsi yang dimuat di SKH *Kedaulatan Rakyat* selama tahun 2013 adalah kombinasi. Kombinasi jenis dan sifat tajuk rencana yang paling sering digunakan yakni gabungan antara jenis tajuk rencana yang bersifat menjelaskan dan memberikan argumentasi. SKH *Kedaulatan rakyat* lebih cenderung menggabungkan kedua jenis sifat tersebut dalam memuat sebuah tajuknya, karena dalam memberikan suatu pandangannya mengenai korupsi SKH *Kedaulatan Rakyat* lebih cenderung menjelaskan suatu peristiwa atau berita yang menjadi peristiwa hangat, kemudian dipaparkan juga suatu argumentasi atau pendapatnya dalam menyikapi suatu peristiwa tersebut beserta dengan analisisnya.

Analisis tajuk rencana berdasarkan jenis dan sifat tajuk SKH Kedaulatan Rakyat 2013

Unit Analisis	F	%
Informatif	-	-
Eksplanatif	-	-
Argumentatif	-	-
Timbul Aksi	-	-
Jihad	-	-
Membujuk	-	-
Menghibur	-	-
Kombinasi	37	100
Jumlah	37	100

Sumber: Data Primer

Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dalam pertanggung jawabannya terhadap masyarakat mengenai turut andilnya media dalam pemberantasan korupsi, SKH *Kedaulatan Rakyat* memuat tajuk-tajuk tentang korupsi dengan memberikan arahan atau penjelasan kepada masyarakat dalam menanggapi suatu kasus korupsi. SKH *Kedaulatan Rakyat* berusaha membentuk pendapat umum guna mengontrol pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.

Simpulan

Analisis ini dilakukan untuk menjawab “bagaimana kecenderungan tajuk rencana tentang korupsi yang dimuat di surat kabar *Kedaulatan Rakyat* selama tahun 2013”. Total keseluruhan sebanyak 37 tajuk dari edisi 3 Januari sampai 31 Desember 2013. Beberapa unit analisis, skala tajuk rencana, topik tajuk rencana, teknik pembahasan tajuk rencana, dimensi, fungsi tajuk rencana, serta jenis dan sifat tajuk rencana, maka peneliti menyimpulkan :

1. Tajuk rencana tentang korupsi yang dimuat

SKH *Kedaulatan Rakyat* selama tahun 2013 lebih cenderung membahas kasus korupsi di tingkat nasional atau pemerintahan pusat. SKH *Kedaulatan Rakyat* menilai permasalahan korupsi pada tingkat pusat atau nasional dianggap penting sedangkan kasus korupsi yang dialami oleh pemilik SKH *Kedaulatan Rakyat* sendiri tidak pernah dibahas atau cenderung ditutupi.

2. Topik tajuk rencana tentang korupsi lebih cenderung memuat topik penyelidikan kasus korupsi. SKH *Kedaulatan Rakyat* lebih banyak menjelaskan tentang proses hukum yang sedang berjalan.
3. Dari segi teknik pembahasan tajuk rencana, SKH *Kedaulatan Rakyat* cenderung menggunakan kombinasi dua teknik sekaligus dalam penulisan tajuk rencana mengenai korupsi, yakni penjelasan dan kutipan, dengan tujuan untuk memperkuat analisis atau pendapat mereka dalam menuliskan penjelasan tentang suatu kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi yang sering dimuat oleh SKH *Kedaulatan Rakyat* ini dijelaskan secara rinci pokok-pokok permasalahan, maksud dan tujuan supaya dapat membantu pembaca dalam memahami kasus-kasus korupsi yang dimuat di dalam tajuk.
4. Dari segi aspek dimensi, SKH *Kedaulatan Rakyat* cenderung mengarah pada dimensi kombinasi antara politik dan hukum. Hal ini sendiri dikarenakan korupsi merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang dilakukan oleh suatu kekuasaan dalam sebuah pemerintahan dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi ataupun bagi golongan
5. Dari segi fungsi tajuk rencana lebih cenderung menggunakan fungsi menjelaskan berita. SKH *Kedaulatan Rakyat* dalam menjelaskan suatu berita korupsi berusaha untuk memaparkannya dengan rinci, seperti apa kasus korupsi tersebut dan bagaimana kasus tersebut terjadi.
6. Dari segi jenis dan sifat tajuk rencana lebih cenderung menggunakan kombinasi antara

tajuk rencana yang bersifat menjelaskan dan yang bersifat memberikan argumentasi. SKH *Kedaulatan rakyat* lebih cenderung menggabungkan kedua jenis sifat tersebut dalam memuat sebuah tajuknya, karena dalam memberikan suatu pandangannya mengenai korupsi cenderung menjelaskan suatu berita yang menjadi peristiwa hangat, kemudian dipaparkan juga suatu argumentasi atau pendapatnya dalam menyikapi suatu peristiwa tersebut dengan analisisnya.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro, Komala, Lukiati, Karlinah, Siti, 2009, *Komunikasi Massa*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Assegaf, Djafar H, 1985, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chaerudin, Dinar, Syaiful Ahmad, Fadillah, Syarif, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung.
- Krippendorff, Klaus, 1993, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat, 2007, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Kususmaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama, 2009, *Jurnalistik Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Percetakan Galangpress, Yogyakarta.
- Siebert, Freds, Peterson, Theodore, dan Schram, Wilbur, 1986, *Empat Teori Pers*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumadiria, Haris, 2005, *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

Tamburaka, Apriadi, 2013, *Agenda Setting Media Massa*, PTRajaGrafindoPersada, Jakarta.

Wiryawan, Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<http://tipikorlitbang.com/peringkat-korupsi-indonesia-di-dunia-tahun-2013/>

<http://www.beritasatu.com/hukum/164117-icw-tren-pemberantasan-korupsi-meningkat-di-tahun-2013.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/03/01/1316406/Pukat.UGM.Pembahasan.RUU.KUHP.Telah.Lupakan.Sejarah>

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>